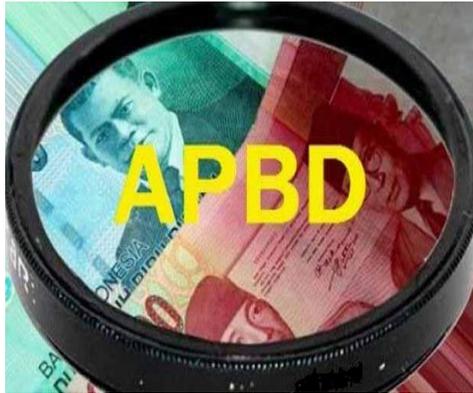


## Temuan BPK Masih Sulit Diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



<http://padangekspres.co.id>

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat Tahun 2012, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendapat opini<sup>1</sup> wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk APBD 2012. Ada beberapa catatan yang diberikan BPK, serta terdapat 231 temuan BPK menurut Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, hampir semua catatan sudah diselesaikan. Dari 231 temuan, 99 persen lebih sudah diselesaikan dan dilaporkan kembali kepada BPK. Dua catatan yang sampai saat ini masih sulit diselesaikan Pemprov menurut Wagub. Pertama, temuan terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS)<sup>2</sup> dan kedua, catatan tentang aset pemprov. permasalahan dana BOS disebabkan oleh beberapa sekolah yang tidak mau menerima dana BOS, sementara uangnya sudah masuk/aturannya. Ketika sekolah tidak mau menerima dana itu harus kembali ke kas negara.

Temuan tentang aset, saat ini dalam proses pengadilan. Salah satunya aset di jalan Riau yang kini diduduki pihak lain atau dalam proses sengketa. Menurut BPK, aset ini menjadi aset

---

<sup>1</sup> Opini pemeriksa, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada criteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yakni (1) wajar tanpa pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, (2) wajar dengan pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, (3) opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan (4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer opinion*).

<sup>2</sup> Bantuan Operasional Sekolah, adalah program pemerintah untuk penyediaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Tujuan program BOS ini yakni untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

pemprov dan ada nilainya. Tetapi yang terjadi, tidak ada nilainya karena masih dalam masalah. Itu bisa digugurkan sesuai aturan BPK, tetapi itu harus dilaporkan.

Laporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun 2012 telah mendapat opini WTP. Namun hal ini tidak berarti tanpa catatan sebagaimana dijelaskan oleh Kepala BPK RI Perwakilan (Kalan) Provinsi Jawa Barat, Slamet Kurniawan. Beberapa hal, seperti hibah dana BOS yang belum dikembalikan menjadi salah satu catatan yang ditemukan di Jabar. Selain asset, dana BOS pun menjadi catatan namun sudah mendekati penyelesaian

Berdasarkan catatan pada saat itu, hibah dana BOS yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 1,4 miliar. Penyaluran hibah BOS APBD Provinsi Semester I Tahun 2012 tidak tepat waktu dengan nilai anggaran sebesar Rp164,6 miliar. Terdapat hibah aset pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Jawa Barat pada Kabupaten/Kota sebesar Rp114 miliar belum disertai naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah.

Beberapa catatan itu di antaranya belanja pegawai yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp18,3 miliar. Sebaliknya belanja barang dan jasa dianggarkan pada belanja pegawai sebesar Rp54,2 miliar. Total, ada enam poin yang menjadi catatan BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2012. "Tapi catatan-catatan itu tidak memengaruhi opini yang diberikan BPK," ujar Kalan. Untuk memperbaiki berbagai catatan itu, BPK sudah memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Tujuannya agar laporan keuangan APBD Jabar 2013 bisa lebih baik lagi. Selain menyebut beberapa catatan, BPK mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan Pemprov Jabar agar keuangan daerah tertata dengan baik. Salah satunya dengan penerapan aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah. "Sistem itu terbukti menjamin kecermatan, keakuratan dan kebenaran untuk penyajian sistem penatausahaan aset," jelasnya. Gubernur Jabar bersyukur atas opini WTP untuk kedua kali itu. Untuk laporan keuangan 2011, Pemprov Jabar juga diberi opini WTP oleh BPK. "Kami bersyukur berarti kita bisa mempertahankan laporan keuangan dengan baik, dengan wajar, sesuai kriteria wajar yang dimiliki BPK," ungkapnya. Disinggung soal masih adanya catatan dari BPK meskipun memperoleh opini WTP, Gubernur menanggapi dengan santai. Sebab, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan. Namun, ke depan, kita akan terus berusaha agar laporan keuangan tahun ini lebih baik. "Kita akan bekerja keras untuk itu," tandasnya.

#### **Sumber berita:**

1. Pikiran Rakyat, Rabu 17 Juli 2013.
2. <http://www.bisnis-jabar.com>, Selasa 16 Juli 2013.
3. <http://bandung.okezone.com>, Selasa 28 Mei 2013.

#### **Catatan:**

Tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke Kabupaten/Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke provinsi pada tahun 2012. Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.*(trf)*

